



Diskusi Kebangsaan Dibubarkan Paksa

Jakarta, MIMBAR - Sekelompok orang tak dikenal membuat onar di acara Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivist Nasional yang dilaksanakan Magz Ballroom, Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9). Mereka memasuki acara diskusi yang sedang berlangsung lalu membubarkan peserta yang hadir sambil mencabut banner, spanduk acara.



Wakapolda Metro Jaya Brigjen Djati Wiyoto Abadhy saat jumpa pers, Minggu (29/9/2024) terkait kasus pembubaran Diskusi Kebangsaan. Limitnews/istimewa

Polisi Kantongi 10 Nama Pelaku

POLISI telah mengantongi 10 nama pelaku terkait pembubaran acara diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh di Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Jaksel). Begini kronologi pembubaran acara diskusi itu. Peristiwa ini terjadi di Hotel Grand

Kemang, Sabtu (29/9) pagi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary mengatakan, pihak kepolisian memang telah berada di lokasi Hotel Grand Kemang dengan tujuan untuk menjalankan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang

berlangsung di depan hotel. Ia juga menegaskan, tidak ada pemberitahuan ataupun izin yang diajukan terkait acara diskusi di dalam hotel tersebut. Sementara itu,

■ Bersambung ke Hal 7

Sebelum memasuki acara diskusi, massa orang tak dikenal melakukan aksi demonstrasi di depan hotel, tiba-tiba masuk ke ruang acara di dalam hotel. Mereka membubarkan diskusi yang berlangsung.

Acara yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) itu juga dihadiri mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr. Din Syamsuddin. Ia mengungkapkan, acara diskusi yang diadirinya bersama sejumlah aktivis dibubarkan paksa oleh orang tak dikenal (OTK).

■ Bersambung ke Hal 7

Langgar Hak Asasi

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pembubaran secara paksa diskusi Forum Tanah Air di salah satu hotel di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9), melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Selain itu, juga melanggar hak atas kebebasan berkumpul secara damai.

“Komnas HAM menesalkan adanya pembubaran dan penyerangan diskusi FTA tersebut yang mana aksi ini melanggar hak kebebasan berpendapat dan berekspresi;

■ Bersambung ke Hal 7



PERINGATAN BERDARAH DI PENGHUJUNG SEPTEMBER

Silakan Tonton Kembali Film G30S/PKI

Medan, MIMBAR - Setiap kali mendekati tanggal 30 September, perbincangan tentang film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C Noer sering kali mencuat ke permukaan.

Film yang diproduksi pada tahun 1984 ini menjadi bagian dari visualisasi sejarah Indonesia yang tak terpisahkan dari narasi peristiwa Gerakan 30 September 1965 -49 tahun lalu.

Namun, seiring dengan bergulirnya waktu, film ini pun mengalami pergeseran makna dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia, mencerminkan perubahan yang terjadi dari era Orde Baru hingga era pasca-Reformasi.

■ Bersambung ke Hal 7



ROCKY GERUNG:

Jokowi Wariskan Utang Besar ke Prabowo

Yogyakarta, MIMBAR - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti rencana kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal menggantikan Presiden Jokowi pada Oktober mendatang.

Ia ungkap hal itu saat menjadi pembicara di Kongres Pancasila XII di Balai Senat UGM Yogyakarta,

■ Bersambung ke Hal 7



- Polisi harus melindungi ya ...
- Ckckck..

Menlu RI Desak PBB Hentikan Kebrutalan Netanyahu

Jakarta, MIMBAR - Isu Palestina terus digemakan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi di forum-forum internasional, khususnya PBB.

Dalam pidato terakhirnya di sidang Majelis Umum PBB, New York pada Sabtu waktu setempat (28/9), Retno mengkritisi Dewan Keamanan PBB yang tampaknya masih belum mengambil tindakan konkrit untuk menghentikan genosida Israel di Gaza.

“Apakah Dewan Keamanan hanya akan mengambil tindakan untuk menghentikan kekejaman Israel. Ketika semua warga Palestina meninggal? Atau ketika seratus ribu warga Palestina terbunuh? Atau ketika konflik bersenjata regional meletus? Itu sudah terlambat!” tegasnya.

■ Bersambung ke Hal 7



Prahara Kekejaman G30S PKI

Oleh : Abdul Aziz,
(Penasihat PW. Persatuan Islam (Persis) Sumut)

PADA tanggal 30 September, 59 tahun silam, menorehkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia dengan terjadinya tragedi kemanusiaan, yakni peristiwa pemberontakan G30S/PKI tahun 1965.

Sudah banyak kajian dari berbagai perspektif dan pandangan, namun hal ini tetap perlu menjadi catatan kelam anak negeri.

Pada tahun 1965 kala itu, sistem pemerintahan Indonesia adalah NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunisme) dengan bentuk demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Soekarno.

PKI pada saat itu dibawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit dengan gencar melakukan aksi kudeta dan pemberontakan, peristiwa G30S adalah penculikan serta pembunuhan terhadap

enam Jenderal dan satu perwira Pertama TNI AD.

Enam Jenderal yang gugur dalam peristiwa G30S PKI adalah Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani, Mayjend R. Soeprapto, Mayjend MT, Haryono, Mayjend, S. Parman, Brigjend DI Panjaitan, Brigjend Sutoyo Siswomiharjo, Perwira Pertama Pierre Andreas Tendean, dan Brigadir Polisi KS. Tubun.

Setidaknya, sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 sampai sekarang, sudah dua kali terjadi peristiwa pemberontakan PKI di Indonesia.

Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah dan menafikan Pancasila dari dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan upaya mengganti dengan bentuk lain yakni ideologi komunisme.

Hal itu dapat dibuktikan dengan dua kali peristiwa pemberontakan yang dilakukan PKI dan antek-anteknya.

■ Bersambung ke Hal 7

LUAR NEGERI

Israel Klaim Bunuh Pentolan Hizbullah Nabil Kaouk

Lebann, MIMBAR - Israel mengklaim telah membunuh pentolan Hizbullah lainnya, Nabil Kaouk, melalui serangan udara terbaru ke Lebanon, Ahad (29/9). Dikutip Reuters, sampai saat ini, Hizbullah belum mengonfirmasi klaim Israel soal kematian Kaouk.

Jika terkonfirmasi, kematian Kaouk terjadi hanya sehari setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke ibu kota Beirut, hingga menewaskan

■ Bersambung ke Hal 7

Jadwal Salat

26 RABIUL AWAL 1446 H

Subuh : 04:58 WIB	Maghrib : 18:21 WIB
Zuhur : 12:19 WIB	Isya : 19:29 WIB
Ashar : 15:28 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

KIP Harus Fair

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)

KARTU Indonesia Pintar menjadi harapan bagi pelajar ekonominya sangat buruk agar dapat melanjutkan pendidikannya hingga memperoleh gelar keserjaan. Di UIN Sumut sendiri tentu banyak mahasiswa baru yang berharap memperoleh KIP. Tetapi prioritas adalah yang ekonomi orangtuanya sangat tidak baik.

Bagi orangtua yang punya kemampuan ekonomi masih lumayan bagus, seharusnya mengurungkan niat memperoleh KIP.

■ Bersambung ke Hal 7



Sejumlah orang tak dikenal merangsek masuk ke acara diskusi 'Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivist Nasional' tak hanya itu mereka membubarkan acara tersebut.

Polisi Kantongi...

Dari Halaman 1

unjuk rasa yang berlangsung tercatat telah memiliki izin.

Polisi menduga sekelompok orang masuk ke ruangan diskusi lewat pintu belakang hotel. Pintu belakang hotel, tak dijaga polisi.

"Saat kami fokus pengamanan kegiatan unras (unjuk rasa) di depan, tiba-tiba kami mendapatkan informasi ada sekelompok orang tak dikenal masuk lewat gerbang pintu belakang," terang Ade.

Ia menambahkan, orang-orang yang masuk dan membubarkan diskusi itu bukan merupakan bagian dari massa aliansi yang sedang berunjuk rasa. "Jadi orang berbeda dengan kelompok yang melakukan Unras," jelasnya.

Pembubaran diskusi itu mengakibatkan sejumlah peralatan rusak, mulai dari banner hingga proyektor.

Kabid Humas Polda Metro Jaya mengimbau agar masyarakat tetap menjaga situasi kamtibmas. Dia memastikan pihaknya akan mendalami persoalan tersebut.

"Agar masyarakat menjaga situasi kamtibmas, jangan

melanggar hukum. Polisi akan melakukan pendalaman dan mengungkap kasus tersebut. Agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang membuat situasi kamtibmas tidak tertib," ujar dia.

Lima Pelaku Diamankan

Polisi telah menangkap 5 orang dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka terkait pembubaran diskusi di Hotel Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Jaksel).

"Terkait peristiwa di Kemang kemarin, 5 orang sudah diamankan. Dua di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka," ucap dia.

"Adapun dari hasil pendalaman tersebut ada dua yang terindikasi melakukan tindak pidana baik itu perusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti daripada Hotel Grand Kemang," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra.

Wira mengatakan terduga perusakan dijerat Pasal 170 KUHP juncto Pasal 406 KUHP. Sementara, terduga penganiayaan dijerat dengan Pasal 170 KUHP juncto Pasal 351 KUHP. (bes/js)

Langgar Hak...

Dari Halaman 1

dan kebebasan berkumpul secara damai," ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiroy dalam keterangan persnya, Minggu (29/9).

Komnas HAM, lanjut Atnike, menekankan tanggung jawab negara atas jaminan perlindungan hak setiap orang berpendapat dan berekspresi serta berkumpul secara damai.

Secara paralel, ia meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang membubarkan diskusi tersebut.

"Juga perlu penegakan hukum untuk kasus-kasus

yang sama di masa lalu khususnya pelakunya aktor-aktor non-negara," ucap dia.

Adapun tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan telah mengamankan lima orang terkait kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Kemang. Dua di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka dijerat dengan Pasal pengrusakan dan penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (cnni/js)

Hidayah

KIP Harus...

Dari Halaman 1

Jangan melakukan hal-hal tak pantas. Karena boleh jadi akan memperoleh murka Allah.

Menghindari hal tak pantas, penting untuk memiliki mekanisme seleksi yang transparan dan akurat, sehingga beasiswa benar-benar diberikan kepada pelajar yang membutuhkan. Pengawasan dan evaluasi yang ketat dapat membantu mencegah penyalahgunaan.

Ada beberapa laporan yang menunjukkan adanya penyalahgunaan beasiswa KIP di perguruan tinggi. Penyalahgunaan ini dapat mencakup:

Pertama, beberapa mahasiswa mungkin melaporkan data keluarga yang tidak sesuai untuk mendapatkan beasiswa.

Kemudian terdapat kasus di mana mahasiswa dengan kemampuan finansial yang baik juga mengajukan beasiswa, sehingga menyisihkan siswa yang lebih membutuhkan.

Di samping itu, sistem verifikasi yang lemah dapat memungkinkan penyalahgunaan ini terjadi.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya sistem pemantauan yang lebih ketat dan penegakan aturan yang lebih baik agar beasiswa KIP benar-benar

mencapai sasaran yang diinginkan.

Beberapa saran untuk penyelenggara Beasiswa KIP di perguruan tinggi:

1. Implementasikan proses verifikasi data yang lebih ketat untuk memastikan bahwa penerima beasiswa benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan.

2. Tingkatkan sosialisasi tentang program KIP, termasuk syarat dan proses pendaftaran, agar lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu dapat mengakses informasi yang diperlukan.

3. Lakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala untuk menilai efektivitas program serta mendeteksi potensi penyalahgunaan.

4. Sediakan program pendampingan atau konseling untuk membantu penerima beasiswa agar dapat sukses dalam studi mereka.

Pastikan bahwa proses seleksi dan penggunaan dana beasiswa dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program Beasiswa KIP dapat lebih efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan. (*)

Diskusi Kebangsaan...

Dari Halaman 1

DIKECAM

Prof Dr. Din Syamsuddin mengecam aksi anarkistis yang dilakukan sejumlah orang tersebut. Dirinya menganggap peristiwa ini sebagai kejahatan demokrasi. "Apa yang terjadi tadi adalah kejahatan demokrasi. Kita membiarkan mereka berorasi sebagai manifestasi demokrasi, tapi ketika mereka masuk dan merusak, ini adalah anarkisme," kata Din Syamsuddin dalam jumpa pers.

Din menilai kejadian ini tidak hanya memalukan, tetapi mengganggu serta merusak kehidupan dan kebangsaan. Dalam kesempatan itu, dia pun menyoroti tanggung jawab pihak kepolisian.

"Polisi, mohon maaf saya ingin katakan terus terang tidak berfungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat, sebagaimana yang menjadi slogan. Ternyata diam saja. Saya sungguh protes keras polisi yang berdiam diri bahkan membiarkan aksi-aksi anarkisme," tambahnya.

Pakar hukum tata negara Refly Harun yang turut hadir di acara tersebut menilai apa yang dilakukan para OTK itu bagian dari tindakan kriminal.

"Tu bukan delik aduan, dan mereka melakukan

itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib. Menurut saya kita perlu ramai-ramai datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini," tutur Refly.

Tampak sejumlah aktivis nasional yang mengikuti jumpa pers seperti Din Syamsuddin, Refly Harun, Said Didu Sunarko, Abraham Samad, Fachrurrozi, Chusnul Maryah, Siti Fadilah, Refly Haru, dan lain-lain. Kecaman juga datang Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM). Menurut Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra, tindakan tersebut telah secara jelas mencederai prinsip kebebasan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945, tepatnya pada Pasal 28.

Pasal itu berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang."

Selain itu juga Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

"Kebebasan berpendapat merupakan hal penting di dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia. Pemerintah telah menjamin kebebasan berpendapat dengan mengeluarkan sejumlah peratu-

ran perundang-undangan sebagai payung hukumnya," ujar Dhahana melalui siaran pers, Minggu (29/9).

Ia menegaskan, tindakan pembubaran tersebut telah melanggar Pasal 24 ayat 1 UU 39/1999. Tak hanya itu, kebebasan berpendapat, khususnya di muka umum, diatur secara khusus dalam UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum. "Merujuk pada Undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap dia.

Dhahana menambahkan, kepolisian sebagai bagian pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM (P5HAM).

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan menghormati kebebasan berpendapat dengan berlandaskan HAM untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis demi tercapainya tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan bertukar pikiran secara bebas selama tidak melanggar hukum. (bes/js)

Israel Klaim...

Dari Halaman 1

di bunker bersama Nasrallah saat rudal Israel menghantam mereka.

Militer Iran menggambarkan Nilforoushan sebagai seseorang yang berkorban dan mengabdikan terhadap keamanan Iran. Sang jenderal juga dikenal sering membantu perjuangan Palestina.

Jika kematian Kaouk terkonfirmasi, ini merupakan pukulan terbaru setelah Hizbullah kehilangan orang nomor satunya.

Sementara itu, kematian Kaouk diyakini bakal membuat Israel semakin berada di atas angin dalam peperangan dengan Hizbullah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan berani memamerkan pencapaian mem-

bunuh Nasrallah dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS pada Jumat malam waktu setempat.

Netanyahu bahkan memamerkan negaranya telah memenangkan peperangan dengan sejumlah milisi di Timur Tengah ini yang memanas sejak agresi brutalnya ke Jalur Gaza Palestina berlangsung pada 7 Oktober 2023 sampai hari ini.

"Saya membawa pesan lainnya untuk majelis umum kali ini dan dunia di luar sana: Kami menang," ucap Netanyahu di atas mimbar Majelis Umum PBB. (cnni/js)

Menu Ri...

Dari Halaman 1

besar-besaran ke Beirut, Lebanon.

"Benarkah? Bagaimana kita bisa percaya pernyataan itu? Kemarin, saat dia berada di sini, Israel melakukan serangan udara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Beirut," tegasnya.

Oleh sebab itu, Menu mendesak agar seluruh anggota PBB bekerja sama menghentikan Netanyahu yang dinilai sebagai penyebab perang tidak kunjung usai.

"Netanyahu ingin perang terus berlanjut.

Silakan Tonton...

Bagi generasi yang tumbuh besar di era ini, film tersebut menjadi pengalaman yang tidak terlupakan, menggambarkan peristiwa kelam yang penuh ketegangan dan kekerasan.

Pemutaran film ini secara rutin menjadi bagian dari peringatan tahunan yang mengajak masyarakat mengingat dan merenungkan peristiwa tersebut.

Pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya menjaga stabilitas nasional dan menghindari munculnya kembali ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Film ini menjadi medium efektif untuk membangun narasi sejarah versi pemerintah, sekaligus memperkuat legitimasi Orde Baru sebagai penguasa yang dianggap telah menyelamatkan bangsa dari ancaman komunisme.

Seiring berakhirnya Orde Baru pada 1998,

Jokowi Wariskan...

Dari Halaman 1

ekonomi, pasti yang diuntungkan pertama motornya adalah korporasi. Bukan BUMN atau koperasi," ujarnya.

Dia lantas mempertanyakan apa yang akan dilakukan Prabowo saat menjalankan pemerintahannya nanti?

"Coba kita tagihkan itu pada Pak Prabowo.. Pak Prabowo akan bikin apa, karena Jokowi meninggalkan utang besar. Dan APBN tahun depan itu harus ada Rp3.600 triliun," kata Rocky.

Rocky mengatakan, dari APBN itu sebesar Rp1.200 triliun akan dikirim ke daerah. Lalu Rp1.000 triliun dipakai untuk menciil bayar utang. Kemudian sisanya dipakai sepele untuk program makan siang gratis. Dan hanya menyisakan sekitar Rp400 triliun.

"Bagaimana negara di masa Pak Prabowo

Prahara Kekejaman...

Dari Halaman 1

PKI, Pemerintah Indonesia melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 membubarkan Partai Komunis Indonesia, sebagai organisasi terlarang di seluruh Wilayah Negara Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

KHATIMAH

Melihat dari perjalanan sejarah, akankah komunis bangkit kembali di Indonesia? Jawabannya tergantung kepada kesadaran dan kepekaan kita sebagai pewaris negeri.

Apakah kita merasakan ada upaya memecah belah kesatuan bangsa dan umat Islam khususnya? Apakah kita merasakan upaya melecehkan agama serta terhadap para pemimpin agama khususnya Islam?

Dan apakah lahan-lahan dan sumber daya alam telah dikuasai kelompok-kelompok tertentu? Adakah dirasakan gelagat menunjukkan upaya ingin membangun dan mengendalikan ideologi negara di tangan kekuasaan!?

Jika, pertanyaan-pertanyaan tersebut menggelayut, berpendar di pikiran kita itu benar adanya maka.... Waspadalah! (*)